



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

**PERAN DAN FUNGSI LEGISLATIF DALAM MENDORONG PENCAPAIAN
TUJUAN PEMBANGUNAN ABAD MILENIUM/MDGs**

Dr. H. Marzuki Alie
KETUA DPR-RI

Disampaikan dalam Seminar Pembangunan Abad Milenium/ *Millenium Development Goals* (MDGs)
Jakarta, 28 Oktober 2010

1

PENDAHULUAN

- ❖ Pembangunan Abad Milenium (*Millenium Development Goals*, MDGs) merupakan program yang dicanangkan PBB pada *Millenium Summit* September 2000. MDGs berisi 8 tujuan dan 17 target yang harus dicapai oleh 191 negara anggota PBB pada tahun **2015**.
- ❖ Ke delapan target tersebut adalah:
 1. menghapuskan **kemiskinan** dan **kelaparan**;
 2. mewujudkan **pendidikan dasar** untuk semua orang;
 3. meningkatkan **kesetaraan gender** dan memberdayakan perempuan;
 4. mengurangi **tingkat kematian** anak;
 5. memperbaiki **kesehatan** ibu;
 6. **memerangi** HIV/AIDS, malaria, dan penyakit-penyakit menular lainnya;
 7. menjamin **kelestarian lingkungan hidup**; dan
 8. membangun **kemitraan global** untuk pembangunan.

2

- ❖ Di Indonesia, berbagai evaluasi terhadap pencapaian MDGs selama ini menunjukkan bahwa **beberapa target telah tercapai**, dan sebaliknya, **beberapa target masih jauh dari harapan**.
- ❖ **Target yang tercapai**; penurunan angka kemiskinan, meskipun ada beberapa pihak yang menganggap bahwa pencapaian tersebut masih perlu dipertanyakan lebih lanjut, mengingat ukuran kemiskinan yang digunakan adalah di bawah 1 (satu) dollar AS per hari per orang.
- ❖ **Target yang masih sulit dicapai**; penurunan angka kematian ibu (AKI) dan penghentian laju dan penurunan kasus HIV/AIDS. Untuk itu, menjadi kewajiban semua pihak agar kedelapan target tersebut di atas dapat tercapai pada waktu yang telah ditentukan, termasuk di dalamnya DPR sebagai lembaga legislatif.

PELAKSANAAN PERAN DAN FUNGSI DPR DALAM PENCAPAIAN MDGS

Berkaitan dengan pencapaian Program MDGs, peran DPR yang telah dilaksanakan sesuai dengan fungsinya (legislasi, anggaran dan pengawasan) adalah sebagai berikut:

1. LEGISLASI:

- DPR berupaya untuk **memasukkan ide mengenai pengaturan tentang MDGs dalam setiap pembahasan RUU** dengan Pemerintah, baik pada Pembicaraan Tingkat I (yang dilakukan dalam Rapat Komisi, Rapat Badan Legislasi, Rapat Panitia Anggaran, atau Rapat Panitia Khusus), maupun Pembicaraan Tingkat II yang dilakukan dalam Rapat Paripurna.
- Dalam proses pembentukan UU ini **dimungkinkan adanya diskusi mengenai strategi pencapaian MDGs** yang dituangkan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai dasar pembahasan rancangan undang-undang.

2. ANGGARAN:

- DPR berperan memberi **persetujuan terhadap APBN** yang diajukan oleh pemerintah, sehingga **dapat memperjuangkan peningkatan anggaran** yang diperuntukkan bagi pembiayaan program dan kegiatan pencapaian MDGs.
- Pelaksanaan fungsi anggaran ini dilakukan pada saat:
 - **Pembahasan dan penetapan** RUU tentang APBN;
 - **Pembahasan Laporan Realisasi** Semester I dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya;
 - Pembahasan RUU tentang **Perubahan APBN**; dan
 - Pembahasan RUU tentang **Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN**.
- Anggaran untuk pencapaian target MDGs seperti kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan telah meningkat dalam APBN. Sebagai contoh, di bidang pendidikan, anggaran pendidikan saat ini telah mencapai 20% dari APBN, sesuai dengan amanat konstitusi.

5

3. PENGAWASAN:

- **Mengawasi pelaksanaan UU, APBN, dan semua kebijakan** pemerintah yang terkait dengan upaya **pencapaian MDGs**. Hal ini dilakukan pada saat melakukan Rapat Kerja dengan Pemerintah maupun kunjungan kerja dan kunjungan lapangan ke daerah.
- Pada kesempatan ini DPR dapat melihat pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait dengan pencapaian MDGs secara langsung dalam masyarakat di setiap daerah serta mengidentifikasi masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

6

PELAKSANAAN

- Upaya pengawasan yang telah dilakukan oleh DPR antara lain:
 - I. Menghapuskan Tingkat Kemiskinan dan Kelaparan:**
 - ❖ Mendorong pemerintah untuk memperkuat dan menjadikan Kementerian Sosial sebagai *leading sector* dalam mengambil langkah untuk menyatukan pemahaman tentang konsep kemiskinan dan penanganannya;
 - ❖ Rapat Kerja dengan Pemerintah, membahas program pengentasan kemiskinan yang dijalankan Pemerintah, seperti Program Subsidi BLT kepada rumah tangga miskin dan Program Keluarga Harapan (PKH);
 - ❖ Mengesahkan Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya melalui UU No. 11 Tahun 2005;
 - ❖ Membentuk UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

7

PELAKSANAAN

- II. Mencapai Pendidikan Dasar secara Universal :**
 - ❖ Rapat Kerja, mendesak pemerintah untuk menempatkan **Program Wajib Belajar 9 Tahun** dan **Pemberantasan Buta Aksara** sebagai prioritas pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial;
 - ❖ Menyetujui alokasi **anggaran pendidikan sebesar 20%** dalam APBN;
 - ❖ Mendesak pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran yang diberikan secara langsung ke sekolah-sekolah (*block grant*);
 - ❖ Mendesak pemerintah untuk mengalokasikan bantuan operasional sekolah (BOS) untuk pengadaan buku secara signifikan.

8

PELAKSANAAN

III. Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan:

- ❖ Mendesak Pemerintah **meningkatkan koordinasi dan penajaman indikator kinerja pelaksanaan program** pengarusutamaan gender secara lintas sektoral;
- ❖ Membentuk **UU No. 23 Tahun 2004** tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan **UU No. 21 Tahun 2007** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- ❖ Mengakomodasi kepentingan perempuan yang menikah dengan warga negara asing dalam **UU No. 12 Tahun 2006** tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- ❖ Mengakomodasi isu tentang *affirmative action* melalui keterwakilan 30% untuk perempuan dalam **paket UU bidang politik**, yaitu: (1) UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; (2) UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; dan (3) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.

9

PELAKSANAAN

IV. Mengurangi Tingkat Kematian Anak dan Meningkatkan Kesehatan Ibu:

- ❖ Mendorong pemerintah agar kebijakan pembangunan kesehatan memprioritaskan program-program berikut:
 1. kesehatan ibu dan anak;
 2. pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
 3. pendayagunaan tenaga kesehatan;
 4. penanggulangan gizi buruk;
 5. peningkatan pelayanan kesehatan di daerah terpencil, tertinggal, daerah perbatasan, dan pulau-pulau terluar.

10

PELAKSANAAN

V. Memerangi HIV/AIDS, Malaria, dan Penyakit Lainnya:

- ❖ Mendesak Pemerintah untuk **memutakhirkan data** yang terkait dengan indikator kesehatan masyarakat sebagai dasar perencanaan kebijakan penanggulangan penyakit;
- ❖ Mendesak Pemerintah untuk **mengendalikan kasus** DBD dan HIV/AIDS agar tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat melalui pendekatan pencegahan;
- ❖ Mendesak Pemerintah untuk **meningkatkan pencegahan dan penanganan penyakit** DBD, TB Paru, dan HIV/AIDS secara lebih intensif dan efektif.

11

PELAKSANAAN

VI. Menjamin Keberlanjutan Lingkungan:

- ❖ Mengkritisi kebijakan pemerintah dalam bidang lingkungan hidup antara lain:
 - ❖ **Merumuskan ambang batas aman taraf** kebisingan sebagai upaya pengendalian polusi suara;
 - ❖ **Menetapkan penghentian kegiatan proyek-proyek** yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan program pelestarian lingkungan hidup;
 - ❖ Mendukung langkah **penegakan hukum** terhadap kasus lingkungan hidup;
 - ❖ Membahas RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam; merevisi UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; menyiapkan RUU tentang Pemanfaatan dan Pelestarian Sumber Daya Genetik; dan membentuk UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

12

TANTANGAN DAN PELUANG PENCAPAIAN TARGET MDGS

Persoalan mendasar yang berkaitan dengan MDGs yang perlu diperhatikan untuk dicari jalan keluarnya, antara lain:

1. MDGs harus dilihat dari **perspektif HAM**.

Komitmen untuk mengurangi kemiskinan **tidak dapat dilepaskan** dari masalah ketidakadilan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

Upaya menghapuskan kemiskinan seyogyanya tidak hanya memperhatikan jumlah penduduk miskin yang berhasil ditekan, melainkan lebih pada **peningkatan kapabilitas orang miskin** melalui bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, yaitu penyediaan lapangan kerja, sehingga mereka akhirnya dapat mandiri.

13

TANTANGAN

2. Target MDGs **tidak boleh dilihat** semata-mata dari **pencapaian angka** secara nasional, melainkan harus dilihat bagaimana **pemerataan pencapaian** tersebut di seluruh wilayah Indonesia.

Hal ini sangat penting untuk diperhatikan, mengingat sampai saat ini masih terjadi kesenjangan antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur.

Diperlukan **pemetaan untuk melihat potensi dan kelemahan tiap daerah**, termasuk kondisi geografis masing-masing, sehingga kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan akan lebih tepat sasaran.

14

3. Pencapaian target MDGs memerlukan **implementasi program dan kegiatan** yang terencana dan tersusun dengan baik.

Program dan kegiatan ini harus dapat **diimplementasikan hingga ke level yang paling bawah/akar rumput**, termasuk aspek managemennya.

Harus diupayakan **agar terdapat efektivitas program secara konkret** di semua level, didukung oleh Pemerintahan yang bersih dan infrastruktur pendukung yang memadai.

PENUTUP

- ❖ Tantangan tersebut **tidak boleh membuat kita berkecil hati**, karena dibalik setiap tantangan pasti terdapat peluang apabila kita mau berusaha.
- ❖ Rasa **optimisme untuk dapat mencapai target MDGs tepat pada waktunya harus tetap kita jaga**, mengingat Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, baik dari aspek sumberdaya manusia, aspek finansial, maupun institusi.
- ❖ Apa yang telah dilakukan oleh **Pemerintah selama ini dapat dikatakan sudah *on track***, mengingat pemerintah memiliki semangat *pro-poor, pro-growth, pro-job, dan pro-environment*.
- ❖ **Tugas DPR adalah untuk mengawasi kebijakan, program, dan kegiatan** yang dilaksanakan oleh pemerintah tersebut, agar target MDGs dapat kita capai tepat pada waktunya.

